



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO SUSILO
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 464450

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 372.000.000

1. Tanah Seluas 2740 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000
2. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1159 m2/60 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 55.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 164.500.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 119.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA FICO2N28LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, HONDA V1J02Q3211A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.885.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 95.945.402



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	672.330.402
III. HUTANG	Rp.	113.648.640
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	558.681.762

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.